

SIKAP KEAGAMAAN DAN POLA TINGKAH LAKU MASYARAKAT MADANI

Syaiful Hamali*

Abstrak

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seorang yang mendorongnya untuk bertindak laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Sikap merupakan predisposisi untuk bertindak senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju terhadap objek tertentu berdasarkan komponen kejiwaan; kognisi, afeksi dan konasi. Artinya sikap merupakan interaksi dari komponen-komponen kejiwaan manusia secara kompleks terhadap lingkungannya. Masyarakat madani dibentuk dengan landasan motivasi dan etos keagamaan. masyarakat madani menunjukkan lingkungan masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlak mulia, egalitarianisme dan menghargai seseorang berdasarkan prestasi kerja. Dan menegakkan hukum, toleransi, pluralistik, berkeadilan sosial dan menghidupkan demokrasi dalam wadah musyawarah. Masyarakat madani berbeda dengan civil society yang lahir dari konteks sosial masyarakat Barat kontemporer, yaitu dari gerakan perlawanan rakyat guna melepaskan diri dari rezim-rezim penindas dan otoriter serta tidak ada hubungannya dengan akhlak atau budi pekerti luhur dan agama. Intelektual muslim kontemporer berusaha untuk memformulasikan nilai-nilai agama dalam masyarakat madani sebagai landasan operasional dalam bersikap dan bertindak setiap individu dalam kehidupan masyarakat

Kata kunci: Sikap, Predisposisi, karakteristik, Egalitarianisme, Civil society.

Pendahuluan

Dalam psikologi sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif terhadap objek-objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman dan penghayatan individu. Sikap itu

terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman seseorang dalam hidupnya, sedangkan sikap yang ditampilkan seseorang adalah hasil dari proses berfikir, merasa dan pemilihan individu terhadap motif tertentu sebagai reaksi terhadap objek.

Masyarakat Madani bukan sebuah konsep masyarakat yang final, melainkan ia sebuah wacana yang telah mengalami proses panjang. Munculnya konsep ini disebabkan adanya kekuatan *civil* sebagai bagian dari komunitas bangsa yang menghantarkan masyarakat pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang di berbagai belahan dunia, dengan label yang berbeda-beda, seperti; Masyarakat Madani, Masyarakat Sipil, Masyarakat Kewargaan, *Civil Society*. Wacana ini muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama saat terjadinya transformasi sosial dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern. Masyarakat madani menunjukkan lingkungan masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlak mulia, *egalitarianisme* dan menghargai seseorang berdasarkan prestasi kerja. Dan menegakkan hukum, berkeadilan sosial, toleransi, pluralistik dan menghidupkan demokrasi dalam wadah musyawarah. Dalam konteks Islam masyarakat madani dibentuk dengan landasan motivasi dan etos keagamaan, yang saat itu dikenal dengan istilah *civil society*. Masyarakat Madani merupakan terjemahan dari istilah konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta.

Tim ICCE UIN Jakarta mengutip pendapat AS Hikam bahwa dalam tradisi Eropa (sekitar pertengahan abad XVIII) pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara (*state*) yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lainnya. Akan tetapi pada paruh abad XVIII terminologi ini mengalami pergeseran makna. *State* dan *civil society* dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai pencerahan

(*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan dunia.¹

Pemakaian istilah masyarakat madani sering juga dipakaikan untuk masyarakat sipil (*civil society*). Namun dikalangan cendekiawan muslim berusaha membedakan antara masyarakat madani dengan *civil society*. Sebagaimana dijelaskan Nucholis Madjid bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang dibentuk dengan landasan motivasi dan etos keagamaan, dan menjadikan agama sebagai kriteria masyarakat yang berperadaban (masyarakat madani). Sedangkan *civil society* dalam konteks masyarakat Barat, lebih menekankan kepada aspek politik dan perlindungan hukum dari hubungan yang berbenturan antara negara disatu pihak dengan warga negara di lain pihak.²

Ahmad Baso dalam Nurcholish Madjid menulis bahwa; Cendekiawan muslim Indonesia menarik wacana *civil society* ke dalam kontek sejarah Islam, karena keyakinan mereka bahwa tradisi Islam juga memiliki perjalanan historis mengenai hal tersebut. Dasar-dasar masyarakat beradab yang telah dimiliki *Bani Abbaasiyah*, kemudian dikembangkan oleh para khalifah yang bijaksana (*al-khalifah ar- Rasyidin*).³

M. Dawam Raharjo mendefinisikan masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut *al-khair*. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan bentuk persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau assosiasi yang memiliki misi dan praktek.⁴ Selanjutnya pada kesempatan lain Dawam mengutip pendapat Anwar Ibrahim bahwa dalam masyarakat madani mengandung tiga hal yaitu; Agama sebagai sumber peradaban, sebagai posisinya dan masyarakat kota adalah hasilnya seperti yang pernah dicontohkan nabi Muhammad Saw dalam membangun

1 Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Pernada Media, 2003, Edisi revisi, h. 238

² Nurcholish Madjid, (et.al), *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Jakarta : Penerbit Mediacita , 2000, Cet. I, h. 318

³ Nurcholosh Madjid, *Civil Society Versi Masysrakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1990, h. 21

⁴ M. Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani : Agama Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2009, h. 52

masyarakat Madinah melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Madinah.⁵

Dengan demikian, masyarakat madani menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dan tulisan ini mencoba membicarakan tentang sikap dan pola tingkah laku keagamaan masyarakat madani dalam konteks keindonesian dengan pendekatan psikologi agama dan sosiologi agama untuk mengkaji konsep jiwa agama individu atau masyarakat.

Karakteristik Masyarakat Madani

Istilah karakteristik masyarakat madani, dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan beberapa ciri khas sebagai prasyarat terbentuknya suatu masyarakat, sehingga ia menjadi nilai-nilai universal dalam membangun masyarakat madani. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, atau mengambil salah satu aspek saja untuk dilaksanakan, tetapi prasyarat itu merupakan satu kesatuan yang utuh atau integral yang menjadi dasar/nilai bagi terciptanya masyarakat madani. Diantara karakteristik masyarakat madani ; Pertama, *free public shepre* yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai wadah untuk masyarakat mengemukakan pendapatnya. Dimana individu mempunyai posisi yang setara tanpa adanya ketakutan dan kekuatiran dalam menyampaikan pendapatnya. Tim ICCE UIN Jakarta mengemukakan pendapat bahwa Arendt dan Habermas menyatakan ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.⁶

Ahmad Gaus menekankan bahwa untuk mengatasi tekanan yang dialami masyarakat, dibutuhkan ruang publik yang bebas. Tekanan itu mengisyaratkan pentingnya sebuah ruangan publik yang bebas (*a free public sphere*). Dan di dalam ruang

⁵ *Ibid*, h. 145

⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, Op.cit, h. 248

publik semacam itulah anggota masyarakat sebagai warga negara dapat melakukan tindakan-tindakan politik secara leluasa tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran termasuk menyampaikan pendapat secara tulisan maupun tulisan.⁷ Dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, dapat dipastikan akan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan inspirasinya terutama yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang otoriter, jika hal ini terjadi para penguasa akan berbuat sekehendaknya.

Kedua, toleransi merupakan suatu sikap yang hendak dikembangkan dalam masyarakat madani, yaitu suatu sikap menunjukn saling menghargai dan menghormati hak dan aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Dengan toleransi memungkinkan timbulnya kesadaran dari setiap individu untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Nurcholish menjelaskan bahwa agama mengajarkan faham kemejemukan keagamaan (*religius plurality*). Pemahaman seperti ini menjadikan masyarakat *klasik* demikian terbuka dan *inklusivitas* sikapnya terhadap masyarakat lain berbeda agama.⁸

Berkenaan dengan keterebukaan kaum muslimin dalam hidup bermasyarakat Nurcholish Madjid mengemukakan pendapat Maxi Diamond, seorang Yahudi bahwa... bagi kaum Yahudi tidak ada lebih terasa asing daripada peradaban Islam yang fanatis, yang muncul dari debu padang pasir pada abad ke tujuh ini, meskipun Islam mewakili suatu pradaban baru, suatu agama baru dan suatu lingkungan baru yang dibangun dilandaskan ekonomi baru, namun Islam mempunyai “ Prinsip Kebahagiaan Intelektual “ yang terwadahi dengan baik, yang pernah dihadirkan kepada kaum Yahudi seribu tahun yang lalu, ketika Iskandar Agung membuka pintu masuk Hellenistik kepada mereka. Sekarang masyarakat Islam membuka pintu-pintu masjid

⁷ Nurcholish Madjid (et.al), *Kehampaan piritual Masyarakat Modern*, *Op.cit*, h. 317

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* , Jakarta : Paramadina, 1992, h. 191

mereka, sekolah-sekolah mereka dan kamar tidur mereka, pintu agama, pendidikan dan pembaharuan.⁹

Dengan demikian semakin jelas hubungan Islam dengan agama-agama lain dalam bingkai pluralisme memiliki sikap beragama yang toleransi dan inklusif. Nurholish menyebutnya dengan “ *al-Hanafiah al-Shamhah* “ maka karakteristik masyarakat madani identik dengan masyarakat Madinah yang dibangun nabi Muhammad Saw.

Ketiga, Dalam teori *historis-sosiologis*, pluralisme merupakan fenomena-fenomena yang terdapat dalam masyarakat yang tidak bisa dimungkiri adanya. Pluralisme atau kemajemukan umat manusia adalah kenyataan yang telah menjadi hendak Tuhan sesuai dengan *sunnahtullah*, karena semua yang terdapat dalam masyarakat yang sengaja diciptakan dengan penuh keragaman yang menunjukkan sebagai karakteristik suatu masyarakat. Pluralisme atau kemajemukan tidak hanya difahami sebagai sikap yang harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, namun sikap itu harus disertai dengan ketulusan untuk dapat menerima kenyataan bahwa perbedaan itu sebagai sesuatu yang alamiah yang bernilai positif bagi masyarakat

Ubaedillah dan Abdul Rozak mengutip pendapat Nurholish bahwa pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civlity*). Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*)¹⁰

Dengan demikian, pluralisme erat kaitannya dengan sikap toleran kepada orang lain dan sikap ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dalam perjalanan sejarah umat manusia seringkali ditemui bahwa konsep pluralisme sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi Islam

⁹ *Ibid*, h. 192

¹⁰ A.Ubedillah dan Abdul Rozak (Penyunting), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2003, h. 316.

telah melaksanakannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam kehidupan masyarakat Madinah.

Keempat, keadilan sosial dalam konteks masyarakat madani dimaksudkan untuk menyebutkan adanya kesinambungan dan pembagian yang proposional, terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya; ekonomi, politik, pengetahuan dan lainnya. Artinya dalam konsep keadilan sosial tidak adanya monopoli/pemusatan kekuasaan atau ekonomi bagi kelompok/golongan tertentu. Nanih Machendrawaty menulis pendapat Nurcholish bahwa cita-cita keadilan sosial ialah membangun suatu bentuk tantangan masyarakat bagi setiap warga dijamin haknya untuk hidup menurut pilihannya sendiri atau tetap dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.¹¹

Secara esensial setiap individu memiliki hak dalam memperoleh kebijakan-kebijakan atau kesejahteraan hidup oleh pemerintah, dimana masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya. Dewasa ini dalam masyarakat banyak ditemui bahwa orang hanya mementingkan haknya sebagai individu dan mengabaikan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Kelima, demokrasi mengandung arti bahwa masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak memandang suku, ras dan agama. Maka demokrasi merupakan satu entitas dalam menegakkan dan membangun wacana masyarakat madani, dimana masyarakat memiliki kebebasan mutlak dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari, termasuk mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Dalam kehidupan masyarakat modern, kehidupan demokrasi merupakan sebagai karakteristik masyarakat yang terbuka, pluralis, toleran. Sebagaimana kehidupan masyarakat Islam yang dibangun Rasulullah Saw. di *Madinah Munawarah*, sebagai suatu masyarakat yang maju dan modern pada masanya dengan substansi musyawarah dalam mengambil keputusan.

¹¹ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syati'i, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategis Sampai Tradisi*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2001, Cet. I, h. 124

Para pakar ilmu-ilmu sosial mengkaji fenomena-fenomena keagamaan yang terdapat dalam masyarakat madani dan menjadikannya sebagai pola kehidupan masyarakat bernegara dan beragama. Sebagaimana ditegaskan Nurcholish Madjid bahwa demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakkan masyarakat madani di Indonesia, demokrasi adalah jalan, bukan tujuan.¹² Dengan demikian, demokrasi adalah jalan atau sarana yang berada dalam wadah musyawarah untuk mencapai tujuan negara, dalam konteks keislaman tujuan negara itu adalah *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Selain itu, demokrasi dapat membantu masyarakat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau pemerintah. Walaupun untuk mengawasi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah bukanlah hanya melalui demokrasi, tetapi masih ada cara atau jalan lain yang harus dilakukan masyarakat. Nurcholish menulis bahwa salah satunya adalah berangkat dari *adigium* yang terkenal dalam politik. Demokrasi tidak dengan sendirinya menjamin adanya pemerintahan yang baik, tetapi ia bisa mencegah keburukan-keburukan tertentu¹³

Sikap dan Pola Tingkah Laku Keagamaan Masyarakat Madani

Agama menyangkut kehidupan batin manusia, oleh karena itu kesadaran beragama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupannya yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral. Berangkat dari kesadaran agama dan pengalaman agama ini, maka muncullah sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan itu merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang sesuai dengan bentuk keimanannya.

Dalam psikologi sosial, sikap yang dimiliki seseorang disertai dengan keinginan individu untuk berbuat. W.A. Gerungan menjelaskan bahwa: Pengertian *attitude* itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang

¹² Nurcholish Madjid, *Religiusitas, Membumikan nilai-nilai Islam Dalam kehidupan Masyarakat Madani*, Jakarta : Paramadina, 2000, h. 10

¹³ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*. Opcit, h. 279

dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi.¹⁴ Sedangkan sikap dalam konteks psikologi agama diapresiasi Jalaluddin dengan ungkapan bahwa timbulnya sikap keagamaan pada seseorang disebabkan adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif.¹⁵ Sikap keagamaan adalah integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama serta tindak keagamaan dalam diri seseorang. Ini menunjukkan bahwa sikap keagamaan menyangkut atau berhubungan erat dengan gejala kejiwaan manusia terhadap objek tertentu

Menurut Abdul Aziz Ahyadi bahwa; dalam kepribadian manusia ada tiga aspek dan fungsi kejiwaan; Pertama, aspek kognitif yaitu berupa pemikiran, hayalan, inisiatif, pengamatan dan penginderaan. Fungsi aspek kognitif adalah menunjukkan jalan, mengarahkan dan mengendalikan tingkah laku. Kedua, aspek afektif yaitu bagian kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan alam perasaan atau emosi. Sedangkan hasrat, kehendak, kemauan, keinginan, kebutuhan, dan elemen motivasi lainnya disebut aspek konatif atau psiko-motorik (kecenderungan atau niat tindak) yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek afektif. Kedua aspek itu sering disebut aspek finalis yang berfungsi sebagai energi atau tenaga mental yang menyebabkan manusia bertindak laku. Ketiga, aspek motorik yang berfungsi sebagai pelaksana dari tingkah laku manusia seperti; perbuatan dan gerakan jasminiah lainnya¹⁶. Gabungan dari ketiga aspek kejiwaan itu adalah cerminan dari jiwa seseorang dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan sebagai pantulan keyakinannya, hal ini yang dapat pelajari dan dianalisa. Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa; proses beragama, perasaan dan kesadaran

¹⁴ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung-Jakarta, PT. Erosco, 1977, Cet. III, h. 151

¹⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. I, h. 185

¹⁶ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung : Sinar baru, 1988, Cet. I, h. 76-77.

beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan.¹⁷

Merujuk kepada pendapat diatas, dalam konteks masyarakat madani bahwa timbulnya sikap dan pola tingkah laku keagamaan berawal dari aspek-aspek kejiwaan manusia, yaitu; aspek kognitif berupa pengenalan, pemahaman, inisiatif individu terhadap rumusan atau karakteristik tentang masyarakat madani. Yang berfungsi sebagai pegangan atau mengarahkan individu dalam bersikap dan berbuat dalam masyarakat. Selanjutnya muncullah aspek afektif yaitu bagian kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan alam perasaan atau emosi individu yaitu berkenaan dengan rasa senang atau tidak senang individu terhadap konsep-konsep masyarakat madani dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kegiatan ini diiringi oleh aspek konatif yaitu hasrat, kehendak, keinginan dan kemauan untuk mengikuti konsep-konsep masyarakat madani, interaksi aspek afektif (perasaan tentang masyarakat) dengan aspek konatif (kecenderungan untuk mengikuti konsep masyarakat madani) disebut sebagai aspek finalis yang berfungsi sebagai energi jiwa individu untuk bertindak/tingkah laku sesuai dengan konsep-konsep masyarakat madani sebagaimana yang terdapat dalam aspek kognitif. Terakhir aspek motorik sebagai pelaksana tingkah laku individu/masyarakat yang terpolakan oleh konsep-konsep karakteristik masyarakat madani atau masyarakat beradab. Maka sikap dan pola tingkah laku masyarakat dibentuk oleh agama sebagai acuan atau pedoman dalam kehidupan..

Selanjutnya, sikap keagamaan seseorang berhubungan erat dengan kepribadian yang dimilikinya. Menurut Sigmund Freud kepribadian manusia terdiri atas tiga sistem atau aspek: 1. *Das Es* (*the id*), yaitu aspek biologis; 2. *Das Ich* (*the ego*), yaitu aspek psikologis; 3. *Das Ueber Ich* (*the super ego*), yaitu aspek sosiologis.¹⁸ Pada *id* terdapat berbagai potensi yang dibawa manusia sejak lahir yaitu berupa insting, nafsu-nafsu primer sebagai sumber energi psikis untuk berbuat dan sekaligus

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991, Cet. XIII, h. 4

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* Jakarta : CV. Rajawali , 1990, Cet. V, h. 145,

memberikan daya kepada ego dan super ego untuk menjalankan fungsinya. Bagi *id* berlaku “Prinsip Kenikmatan” yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara atau jalan. Dan *ego* berfungsi merealisasikan kebutuhan-kebutuhan *id* dengan menyeleksi bentuk pemuasannya, ketersediaannya, dan cara mendapatnya, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dalam konteks ini adalah sesuai dengan kriteria masyarakat madani atau nilai-nilai agama. Dengan demikian bagi *ego* berlaku “Prinsip Realitas” sedangkan *super ego* memiliki suatu sistem atau unsur moral masyarakat. Djameluddin Ancok menulis bahwa; Kontak dengan lingkungan inilah yang mengembangkan *super ego*, maka bagi *super ego* berlaku “Prinsip Idealitas” sebab *super ego* menuntut kesempurnaan dan idealitas perilaku dengan ketaatan terhadap norma-norma lingkungan sebagai tolok-ukurnya.¹⁹

Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan, maka dalam kepribadian manusia sebenarnya telah diatur semacam sistem kerja untuk menyelaraskan tingkah laku manusia agar tercapai ketenteraman dalam batinnya. Proses pelaksanaan atau terjadinya perbuatan itu disebut dinamika kepribadian manusia, yang digerakkan oleh unsur energi rohaniyah, naluriyah, ego, super ego. Dinamika kepribadian itu menunjukkan bahwa jika perbuatan yang dilaksanakan oleh individu itu salah, maka *ego* mendapat hukum dari *ego-ideal* yaitu berupa kegelisahan, penyesalan, dan sebagainya. Sebaliknya, bila perbuatan yang dilaksanakan individu itu baik, maka *ego* mendapat penghargaan/pujian dan sebagainya dari hati nurani dalam bentuk ketenangan batin, kepuasan.

Menurut teori yang kemukakan Eric Fromm bahwa kepribadian terdiri dari watak dan karakter. Watak termasuk unsur (tidak berubah) sedangkan karakter terbentuk dari pengaruh luar. Karakter terbentuk dari asimilias dan sosialisasi.²⁰ Asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan bendawi seperti; rumah ibadah, kitab suci dan lainnya. Sedangkan

¹⁹ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1997, Cet, II, h. 50

²⁰ Jalaluddin, Opct, h. 167.

sosialisasi menyangkut hubungan antar manusia, misalnya orang tua, guru, tokoh agama dan sebagainya. Kedua hubungan ini membentuk karakter manusia. Dengan mengacukan kepada teori di atas tergambarlah bahwa pembentukan kepribadian sangat berhubungan dengan nilai-nilai moral atau agama

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem, adat istiadat tertentu yang berlangsung terus menerus dan diikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam konteks Islam Yusuf al-Qorodowi menjelaskan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang beriman kepada Allah swt, sebab iman kepada-Nya akan membuat kehalusan dan ketinggian moral serta kesadaran sosial. Selanjutnya akan melahirkan perilaku budaya dan kontrol sosial (moral) yang tinggi. Semua prinsip dan nilai-nilai dari Allah menjadi dasar dari semua aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan seni, kebudayaan dan sebagainya. Sehingga masyarakat Islam adalah masyarakat yang Robbanny (berpegang pada nilai-nilai Illahi), manusiawi, dan seimbang (harmonis).²¹

Selanjutnya, masyarakat madani menurut Nurcholis Madjid disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah gambaran masyarakat yang beradab yang bercirikan; berbudi luhur, berakhlak mulia, egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi yang diperolehnya (bukan berdasarkan prestise seperti; keturunan, kesukuan, ras, dan lainnya), dan keterbukaan berpartisipasi bagi seluruh anggota masyarakat berdasarkan muasyawarah, yang tegak berdiri di atas landasan keadilan, yaitu keteguhannya berpegang pada hukum, serta tegaknya toleransi atas pluralitas dalam masyarakat. Dalam kehidupan mereka selalu mengutamakan musyawarah dalam rangka menegakkan demokrasi.

Dalam konteks keislaman sikap dan pola tingkah laku keagamaan masyarakat madani berdasarkan pada konsep masyarakat Islam. Pertama, masyarakat Islam mendasarkan aktifitasnya pada keimanan kepada Allah swt, sebagai acuan

²¹ Yusuf al-Qorodowi, *Kayfa Nata Ma'a al-Qur'an fi al-Addin*, (Kairo; Dar al-Syuruq, 2000), Cet. IV, h. 11

dalam kehidupan meraka sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena kepercayaan kepada Allah akan melahirkan konsep-konsep keimanan lainnya. Takkala sebuah konsep-konsep kepercayaan menyentuh kepentingan manusia maka lahirlah syari'ah (agama). Bila konsep kepercayaan diyakininya dengan baik, maka pelaksanaan syari'ahnya berlangsung pula dengan baik, Selanjutnya kegiatan itu melahirkan akhlak yang mulia atau sikap dan pola tingkah laku yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa; Sinergi antara antara aqidah dan syari'ah akan melahirkan perilaku yang baik (akhlak yang mulia) dalam rangka mengembangkan wacana keadilan, pluraisme, toleransi, demokrasi dalam wadah musyawarah. Sebagaimana dilaksanakan Nabi Muhammad saw. ketika membangun masyarakat Islam di Medinah.

Kedua, Bersifat rasional/ijtihad terhadap keadaan sosial masyarakat, dan lingkungan tempat tinggalnya, gunanya untuk dapat memahami kandungan teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan dalam mewujudkan masyarakat beradab, Dewasa ini intelektual muslim terus mengembangkan teori ijtihad, yakni dengan merombak pola pikir masyarakat dari yang tidak rasional menjadi rasional guna menegakkan nilai-nilai dan sikap keagamaan dan pola tingkah laku masyarakat untuk disesuaikan dengan masa kekinian. Dengan berubahnya pola pikir mereka akan berimplikasi ke arah yang lebih baik dalam bidang ekonomi, HAM, penegakkan hukum, toleransi terhadap kemajemukan, dan penegakkan demokrasi, kemudian komponen-komponen masyarakat ini bergerak bersama-sama, menuju kepada satu tujuan, yaitu menegakan *amal ma'ruf* (nilai-nilai kebaikan) *nahi mungkar* (nilai-nilai keburukan) akhirnya akan mewujudkan masyarakat utama, yaitu masyarakat yang *tamaddun* atau masyarakat yang memiliki peradaban.

Masyarakat madani dalam konteks keindonesian tidak terlepas dari jiwa keagamaan masyarakat yang terlihat dalam pendidikan demokrasi, hukum, keadilan, toleransi dan pluralitas sebagai sumber moralitas masyarakat modern, secara tidak langsung nilai-nilai agama telah memperkuat kualitas pribadi, sikap dan pola tingkah laku keagamaan. Agama telah menyatu dengan jiwanya, sehingga mereka mengukur segala sesuatu

dengan agama. Kartini Kartono mengemukakan pendapat Gordon W Allport bahwa cara beragama ini disebut dengan instrinsik artinya; cara ini dianggap bisa menunjang kesehatan jiwa, memperkaya kehidupan batin dan menghidupkan masyarakat yang damai. Sebab agama dipandang sebagai *Comprehensive Commitnet dan Tracing Integrating Motives* yang mengatur seluruh hidup seseorang. Agama diterima sebagai faktor pemadu/pemersatu atau *Unifiing Factor*,²² Masyarakat intrinsik mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dalam *berbagai* aspek kehidupan manusia secara umum, sehingga sikap dan pola tingkah laku keagamaan terlihat dalam bidang:

Sikap dan Pola Tingkah Laku Keagamaan Dalam Pluralitas

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki heterogenitas, dengan berbagai etnis, bahasa, dialek, dan dengan berbagai macam agama dan kepercayaan serta aneka macam corak pemikiran (politik) dan adat istiadat. Kesemuanya itu rentan terjadinya perselisihan, perpecahan, pertikaian dan permusuhan di antara anggota masyarakat. Dalam pengamatan penulis, kemajemukan/ pluralis merupakan fenomena dan kenyataan yang tidak dapat diingkari. Pluralis umat manusia dalam hidup ini adalah kehendak Allah. Semua yang terdapat di dunia ini diciptakan dengan penuh keragaman sebagai dasar kehidupan manusia yang pluralis, sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an : "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantra kamu. Sesungguhnya Alah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*" (QS: al-Hujurat : 13).²³

Pluralis merupakan sesuatu yang tidak dapat dimungkiri, kerana pluralis atau kemajemukan itu berasal dari Allah. Dalam kaitannya dengan masyarakat madani di Indonesia konsep

²² Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1989, Cet. VI, h. 300

²³ Depag. RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quraan Depag.RI, Pelita III Tahun III, 1981/1982,, h. 847

pluralis sangat relevan jika diterapkan terhadap kehidupan masyarakat yang kompleks. Justru itu, diharapkan dari setiap masyarakat dapat menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya, kemudian menumbuhkan sikap kebersamaan yang baik. Karena kemajemukan itu bagian dari kehendak Allah, karena pluralis mempunyai dasar yang kuat dalam setiap agama. Namun disisi lain agama dapat pula menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah umat beragama. Hendro Puspito menulis beberapa konflik sosial yang bersumber dari agama. (1). Perbedaan doktrin dan sikap, (2). Perbedaan suku dan ras umat beragama, (3). Perbedaan tingkat kebudayaan, (4). Masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama²⁴.

Dalam kaitannya dengan masyarakat madani, konsep pluralis sangat cocok diterapkan dalam masyarakat Indonesia, karena dengan menghormati dan memberdayakan kemajmukan itu akan menghindarkan konflik antara sesama warga negara. Artinya, memberdayaan masyarakat disini bukan hanya mengakui keberagaman, namun sikap mengakui dan menerima pluralitas harus disertai dengan sikap yang tulus dan positif, karena keberagaman yang diberikan manusia dimuka bumi ini merupakan rahmat yang diberikan Allah. Untuk itu diharapkan setiap individu dituntut untuk ikut serta ambil peran dalam usaha pemberdayaan ini, usaha yang efektif bila direalisasikan oleh seluruh komponen masyarakat akan terciptalah masyarakat beradab (*civil society*) di negeri tercinta

Sikap dan Pola Tingkah Laku Keagamaan Dalam Demokrasi

Dalam bahasa agama, demokrasi diistilahkan dengan masyarakat yang selalu bertindak dengan landasan musyawarah, dari sudut pandang politik, demokrasi adalah katagori yang dinamis, senantiasa bergerak atau berubah. Nurcholis Madjiid menjelaskan bahwa: musyawarah yang benar yaitu musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggungjawab kemanusiaan yang merupakan dasar tatanan masyarakat dan negara demokrasi²⁵

²⁴ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Jakarta : BPK. Gunung Mulia, 1988, Cet. IV, h. 151

²⁵ Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam, *Op.cit*, 191

Demokrasi dalam Islam ditegaskan Allah dalam al-Qur'an surat As-Syura, berbunyi : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka : dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (QS; Asyysur: 38) .²⁶

Selanjutnya, pandangan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi merupakan sikap hidup yang teguh pada demokratis. Pandangan hidup ini menuntut moral pribadi yang tinggi, dan semangat musyawarah, menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya *partial functioning of ideal*.

Dalam masyarakat yang belum terlatih dan terbiasa berdemokrasi, salah satu tantangan nyata dalam masyarakat madani ialah merubah situasi kejiwaan atau *mind set* yang tumbuh dalam masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa pemerintahan orde baru telah membuat masyarakat menerima saja aturan-aturannya walaupun aturan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena selama pemerintahan orde baru masyarakat selalu diberikan satu alternatif sehingga masyarakat tidak ada pilhan.

Dalam proses yang dinamis, selalu mengharapkan kedewasaan wawasan masyarakat, untuk bersikap santun dalam pola hubungan interaksi dalam masyarakat. Dalam pola demokrasi ini, diharapkan kesedian, mendengar, memberi kebebasan, dan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat . Demokrasi dalam rangka menuju masyarakat madani, berarti menunjukkan sebuah proses demokrasi, dalam melaksanakan nilai-nilai *civilty* (keadaban), bernegara dan bermasyarakat.

Dalam pemerintahan yang demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *performed*, sedangkan kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat secara umum, punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma demokrasi. Maka oleh sebab itu harus tumbuh satu keyakinan dalam masyarakat bahwa demokrsi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dari sistem pemerintah yang lain.

²⁶ Depag.RI, *Opcit*, h. 789.

Untuk itu, masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai *way of life*, yang menuntun tata kehidupan masyarakat, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan.

Setelah menganalisa secara seksama pembahasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa konsep demokrasi dalam masyarakat madani sangat relevansi sekali untuk dilaksanakan penguasa atau pemerintah, karena tidak terlepas daripada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar pembahasannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau hak azasi manusia sehingga konsep masyarakat madani sangat berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia secara umum, agar menjadi masyarakat berperadaban

Sikap dan Pola Tingkah Laku Keagamaan Dalam Toleransi

Menurut Nurcholish Madjid toleransi merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran agama. Jika toleransi menghasilkan adanya tata pergaulan yang “ enak “ antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah, atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.²⁷

Dalam pandangan penulis, toleransi merupakan sikap yang harus dikembangkan dalam konteks masyarakat madani, yang terdiri dari berbagai macam ras, agama dan suku sebagai antisipasi terjadinya pergolakan dan perselisihan, karena toleransi menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain, termasuk di dalamnya aktivitas-aktivitas keagamaan. Selain itu, sikap toleransi pada individu memungkinkan lahirnya sikap kesadaran dari masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok lain yang berbeda. Dengan adanya sikap toleransi pada diri individu akan memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat untuk menganut agamanya, untuk dihormati dan mengakui keberadaannya, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk hidup berdampingan, seperti yang dilaksanakan Rasulullah saw. Madinah

²⁷ Nurcholis Madjid, Asas-asas Pluralisme dan Toleransi Dalam Masyarakat Madani, *Op-cit*, h. 19

Sebagai landasan normatif bagi sikap toleransi, dapat ditemui dalam al-Qur'an Surat An-'Am ayat 108 : *“ Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”* (QS; al-An'am: 108)).²⁸

Persaudaraan dalam ayat diatas, menunjukkan persaudaraan tidak hanya khusus tertuju kepada sesama muslim, tetapi termasuk juga warga masyarakat bukan muslim. Toleransi berarti bersifat tenggang rasa (menghargai, membiarkan, membolehkan) terhadap pendiri (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri.

Dalam konteks masyarakat madani, sikap toleransi ini relevan sekali untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia guna untuk mengantisipasi pergolakan, perselisihan dan pertikaian diantara anggota masyarakat yang berbeda dalam pemahaman ajarannya atau agama orang lain.. Dengan mengembangkan sikap toleransi, akan menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, aktifitas yang dilakukan oleh orang lain. Dan konsep toleransi ini sebagai salah satu kunci terciptanya kerukunan umat beragama dalam masyarakat.

Sikap dan Tingkah Laku Keagamaan Dalam Keadilan Sosial

Dalam masyarakat sikap dan tingkah laku keagamaan masyarakat di Indonesia sangat berkaitan erat dengan keadilan. Sebagaimana firman Allah : *“Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sediktpun) tidak dianiaya”* (QS;48).²⁹

Ayat ini menggambarkan perbuatan dan tindak tanduk orang yang berbuat atau berlaku adil dalam kehidupan masyarakat, perbuatan itu paling dekat kepada sikap taqwa.

²⁸ Depag.R.I, AlQur'an Dan Terjemahannya, *Op-Cit*, h. 205

²⁹ Depag. RI. Al-Quran Dan Terjemahannya, *Op-Cit*, h. 314

Berlaku adil dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan ketuhanannya. Konsep keadilan sosial ini dapat pula menenteramkan, mendamaikan masyarakat dari kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keadilan sosial dalam masyarakat madani meliputi aspek kehidupan :

a. Aspek ekonomi

Dalam masyarakat madani masalah ekonomi selalu berorientasi kepada keadilan sosial. Maksudnya keadilan dalam bidang ekonomi memiliki rasa sepenanggungan bagi seluruh lapisan masyarakat, karena masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama, untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak yang berdasarkan keadilan sosial, sehingga pemerataan ekonomi, diharapkan mampu menyentuh lapisan masyarakat. Aspek keadilan dalam bidang ekonomi oleh Nurcholish Madjid dikaitkan dengan pengembangan masyarakat Islam di Indonesia dengan cara merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terutama dalam sila kelima, yaitu; keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Memberdayakan ekonomi umat akan dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, karena Islam sangat menentang kemiskinan, dalam salah satu hadist Nabi menegaskan bahwa *kemiskinan akan mendatangkan kekufuran*. Namun Islam memberikan solusi untuk memberantas kemiskinan yaitu dengan membayarkan zakat, infak, sadaqah dan sebagainya kepada yang berhak menerimanya, tentang pelaksanaannya tergantung kepada management pengelolanya, Menurut hemat penulis adalah dengan membentuk koperasi atau badan usaha lainnya. Modal awal berasal dari pembayaran zakat mal, infaq atau sadaqah kaum muslimin, setelah zakat dibayarkan kepada para mustahiqnya, kemudian para mustahiq mengumpulkan dana zakatnya tadi, sehingga terbentuklah semacam badan usaha dengan pemegang saham adalah para mustahiq, sedangkan pekerjanya adalah para mustahiq, sehingga upah yang mereka terima setiap minggu atau bulan dapat membiayai kehidupan keluarga mereka, disamping itu setiap akhir tahun mereka memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut. Dengan demikian keadilan sosial bidang ekonomi dapat mengatasi kesulitan umat.

b. Aspek Hukum

Penegakkan hukum dalam masyarakat merupakan salah satu prasyarat berdirinya masyarakat madani. Dalam hal ini Nurcholish Madjid menegaskan bahwa; Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa keadilan bidang hukum belum dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Selama ini kita melihat berapa banyak koruptor-koruptor, yang bebas dari hukuman, ketika ia mampu membeli hukum dengan kekayaannya. Sedangkan yang melanggar hukum adalah rakyat biasa (wong cilik), maka diberi hukuman yang benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada hal menegakkan hukum adalah amanat Allah yang diperintahkan untuk dilaksanakan.³⁰

Dalam pandangan hukum bahwa semua anggota masyarakat harus tunduk dan patuh pada hukum, semua anggota masyarakat sama dimata hukum, bila suatu ketentuan atau aturan telah dilanggar manusia berarti ia telah melanggar amanat Allah, dengan kata lain perbuatannya itu telah mengingkari adanya Allah. Dalam pergaulan masyarakat orang yang melanggar hukum telah merusak ketentuan dan peraturan (*prinsip rule of law*) sehingga mereka dijauhi teman, kerabat dan masyarakat.

c. Aspek Politik

Negara sebagai wadah bagi masyarakat, sudah seharusnya mengakomodasi semua kepentingan masyarakatnya, semua warga masyarakat seharusnya mendapat hak dan kewajiban yang sama dalam bidang politik, sebagaimana dicontoh oleh Rasulullah saw. di Medinah , sekalipun beliau memegang kekuasaan dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun beliau memberdayakan semua warga masyarakatnya, yaitu dengan memberikan kesempatan dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat.

Pasca reformasi politik di Indonesia keadilan berpolitik terbuka bagi masyarakat sehingga memberikan dampak yang positif, masyarakat akan secara penuh memiliki hak dan kewajiban serta kebebasan dalam menentukan arah pemikirannya dalam berpolitik tanpa dibayang-bayangi oleh intimidasi, ketakutan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat dan

³⁰ Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, *Op-cit*, h. 171

pemikirannya. Bahkan masyarakat bebas mengeluarkan kritikan terhadap pejabat negara, penegak hukum dan badan legislatif. Dalam konteks masyarakat madani harus ada ruang yang bebas (*free public sphere*) sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat atau berpolitik. Pada ruang publik yang bebas, individu mempunyai posisi yang setara tanpa mengalami ketakutan dan kekawatiran terhadap penguasa atau pemerintah.

d. Hak Azasi Manusia

Dalam konsep masyarakat madani, Hak Azasi Manusia merupakan hak yang paling pribadi bagi manusia, justru itu ia harus di hormati keberadaannya. Perbedaan pendapat diantara sesama manusia, harus disikapi dengan kepala dingin bukan dengan cara memberantas kebebasan itu dengan kekerasan, sebagaimana yang dilakukan pada pemerintahan otoriter. Islam sebagai sebuah agama memiliki ajaran yang universal dan komprehensif yang meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak, yang masing-masing memuat ajaran tentang mekanisme pangabdian, baik kepada Allah dan manusia maupun kepada alam semesta.

Menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia, selalu menjadi tema diskusi Nurcholish Madjid, dalam menegaskan masyarakat madani di Indonesia, sehingga semakin terlihat arah dan dampak kemajuan dan perlindungan HAM bagi masyarakat. Pada kesempatan ini telah diadakan kajian ulang terhadap kebijakan Orde Baru yang berlawanan dengan prinsip HAM itu sendiri. Kemudian, para ahli menyusun peraturan, perundangan yang berkaitan dengan pembekuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan seperti di Indonesia. Maka konsep Hak azasi manusia akan melahirkan komitmen bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat ideal atau masyarakat berperadaban.

Berdasarkan pemikiran diatas, tergambarlah bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tentang Hak Asazi manusia, mempunyai titik temu antara konsep *free public sphere* dalam konsep masyarakat madani dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia. Dengan *gambaran* bahwa masyarakat yang memiliki peradaban adalah berkeadilan sosial, yang berimplikasi dalam penegakkan hukum, politik, ekonomi, dan Hak Asazi Manusia, toleransi dalam kemajemukan masyarakat, demokrasi dengan landasan musyawarah.

Di era reformasi, usaha dan upaya menuju ke arah terciptanya masyarakat madani telah terlihat, dimana pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti; dibidang hukum telah dibentuknya organisasi atau lembaga bantuan hukum (LBH), yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa tertindas dan ketidak-adilan. Di bidang ekonomi, adalah pengembangan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan melalui pemberdayaan koperasi, Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Raskin (beras rakyat miskin). Kemudian terbukanya bank-bank perkeridatan rakyat (BPR) untuk mengembangkan usaha masyarakat. Bahkan, diantara bank-bank pemerintah dan swasta meminta legitimasi agama dengan memakai label “ Syari’ah “ pada produknya, guna menarik nasabahnya memakai jasa bank mereka. Selanjutnya, dalam bidang keadilan sosial telah diadakan program bantuan terhadap desa-desa dalam bentuk PNPM bagi masyarakat, mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu disediakan berbagai bentuk bea siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan pemerintah atau swasta sebagai perwujudan rasa kemanusiaan sebagai substansi dari masyarakat madani.

Penutup

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seorang yang mendorongnya untuk bertindak laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Sikap merupakan predisposisi untuk bertindak senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju terhadap objek tertentu didasarkan pada komponen kejiwaan manusia seperti; kognisi, afeksi dan konasi, artinya sikap merupakan interaksi dari komponen kejiwaan manusia secara kompleks terhadap lingkungannya, karena lingkungan individu cukup berarti dalam memberikan warna terhadap kepribadian seseorang. Hal ini berawal proses beragama, perasaan dan kesadaran beragama serta akibat-akibat yang dirasakan individu merupakan pola tingkah laku keagamaan sebagai hasil dari keyakinan yang dianutnya.

Masyarakat madani menunjukkan lingkungan masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlak mulia,

egalitarianisme dan menghargai seseorang berdasarkan prestasi kerja. Dan menegakkan hukum, berkeadilan sosial, toleransi, pluralistik dan menghidupkan demokrasi dalam wadah musyawarah, dalam konteks keislaman masyarakat madani dibentuk dengan landasan motivasi dan etos keagamaan sebagai sebuah karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat. Masyarakat madani berbeda dengan *civil society* yang lahir dari konteks sosial masyarakat Barat kontemporer yang lahir dari gerakan perlawanan rakyat guna melepaskan diri dari rezim-rezim penindas dan otoriter serta tidak ada hubungannya dengan akhlak atau budi pekerti luhur dan agama.

Intelektual Muslim kontemporer berusaha untuk memformulasikan kriteria masyarakat madani sebagai operasional dalam menghidupkan jiwa keagamaan dan nilai-nilai agama sebagai landasan operasional dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga agama sebagai *frame of reference* dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini terlihat dalam sikap dan pola tingkah laku keagamaan masyarakat dalam kehidupan pluralitas, toleransi, demokrasi dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. .

Daftar Pustaka

- A.Ubedillah dan Abdul Rozak (Penyunting), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2003,
- Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung : Sinar Baru, Cet. II, 1988,
- Depag. RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al- Quraan Depa. RI, Pelita III/Tahun III, 1981/1982
- Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Jakarta : BPK. Gunung Mulia, Cet, IV, 1988,
- Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, Cet. II, 1997.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996,

- Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, Cet. VI, 1989,
- M. Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani : Agama Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syati'i, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategis Sampai Tradisi*, Bandung : PT. Rosdakarya, Cet. I, 2001.
- Nurcholish Madjid, *Civil Society Versi Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1990,
- , *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1992
- , (et.al), *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Jakarta: Penerbit Mediacita, Cet. I, 2000,
- , *Religiusitas, Membumikan nilai-nilai Islam Dalam kehidupan Masyarakat Madani*, Jakarta : Paramadina, 2000.
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* Jakarta : CV. Rajawali, Cet. V. 1990,
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Pernada Media, edisi Revisi, 2003,
- W.A. Gerungan, *Psychologi Sosial*, Bandung-Jakarta, PT. Erosco, Cet. III, 1977,
- Yusuf al-Qordowi, *Kayfa Nata Ma'a al-Qur'an fi al-Addin*, (Kairo; Dar al-Syuruq, Cet. IV, 2000.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. XIII, 1991

*Drs. Syaiful Hamali, M.Kom.I, Dosen Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intaan Lampung. Alumni Program Pasca Sarjana IAIN Raden Intan.